

EVALUASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSI BAGI PESERTA DIDIK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI SDN 131/IV KOTA JAMBI

Paramita Isabella, Emosda, Suratno

Universitas Jambi

ABSTRACT

The research was aimed to evaluate the implementation of inclusive education in SD Negeri 131/IV Kota Jambi using CIPP (context, input, process, and product) models. This research is a qualitative study with case study approach. Data was collected through observation, interviews, and documentary study. Data analysis was conducted in three phases: the first phase was preliminary analysis, the second phase was done while collecting data at the site, and the third one was done after completing the data collection. The data analysis was conducted through developing categories, data reduction, data presentation, making conclusions, and verification. The study concludes that the implementation of inclusive education in Elementary School of 131/IV Jambi City generally classified as good criteria where there are 68.35 % of sub-indicators of inclusive education's implementation at school that appropriate with the standards. Inclusive education at school provides benefits, but there are some parts of supporting programs that have not been accordance with the standards. Therefore, the researcher recommends that the program can be continued, with the term revisions must be made through an adjustment and improvement of some components that have not been appropriate to these provisions to get a better quality of the program. Furthermore, for others that would like to conduct similar studies in different settings should be able to avoid what the limitations of this study, namely by narrow the focus of research and using mix-method research.

Keyword: *evaluation, inclusive education*

PENDAHULUAN

Layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus secara terpisah (segregasi) dilaksanakan dengan menempatkan anak-anak berkelainan di sekolah-sekolah khusus. Sistem pendidikan segregasi mengarah pada pola pendiskriminasian anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan dengan memisahkannya dengan anak normal yang sebaya. Terdapat beberapa pendapat yang menyatakan bahwa bagaimanapun sistem pendidikan segregasi secara etis tidak dapat diterima (O'Hanlon, 2003:16) di mana pendidikan segregasi tidak menjamin adanya kesempatan anak berkelainan untuk mengembangkan potensinya secara optimal. Dalam pendidikan segregasi juga terdapat pelabelan kepada anak berkebutuhan khusus. Dalam hal ini Dunn (Smith, 2012:42) berpendapat bahwa memberikan label kepada anak-anak dengan cara ditempatkan di sekolah khusus membuat suatu stigma yang sangat destruktif bagi konsep diri anak tersebut.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang tidak bersifat diskriminatif bagi semua peserta didik, maka perlu diselenggarakan sistem pendidikan yang

bersifat inklusif. Menurut O'Hanlon (2003:14), konsep inklusi menawarkan lebih dari sekedar mentoleransi adanya perbedaan, tetapi lebih menekankan pada ikatan antara orang-orang yang terlibat dalam komunitas tersebut dimana masing-masing individu saling mengenal dan dihargai sebagai bagian dari anggota komunitas.

Pengembangan sistem pendidikan inklusi menekankan pada usaha untuk menemukan cara-cara merespon keberagaman individu peserta didik. Hal ini bermakna bahwa sistem pendidikan inklusi memperdulikan usaha untuk membantu peserta didik berkebutuhan khusus agar bisa belajar dengan baik di kelas reguler dengan cara meruntuhkan hambatan-hambatan yang dihadapi setiap peserta didik dalam belajar. Program pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus lebih diarahkan kepada pemberian intervensi khusus agar dapat memanipulasi alat atau media yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran, sumber bahan, serta situasi lingkungan sekolah (Delphie, 2005:3). Dengan intervensi yang diberikan, maka hambatan dalam belajar tidak lagi menjadi rintangan bagi peserta didik berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pendidikan yang terintegrasi dan layak.

Ainscow (2001:111) menyatakan bahwa inklusi mendorong terjadinya restrukturisasi terhadap program sekolah dalam rangka merespon keberagaman seluruh peserta didik yang ada di sekolah tersebut. Artinya, pendidikan inklusi tidak mempermasalahkan apakah anak berkebutuhan khusus dapat mengikuti program pendidikan, namun bagaimana guru dan sekolah dapat mengadaptasi program pendidikan agar sesuai dan layak bagi kebutuhan anak.

SD Negeri 131/IV Kota Jambi merupakan salah satu sekolah yang memberikan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh layanan pendidikan sesuai dengan kebutuhannya. Penyelenggaraan pendidikan inklusi di SD Negeri 131/IV Kota Jambi dilaksanakan sejak tahun 2005 dan selama ini belum pernah dievaluasi sehingga belum diketahui secara pasti apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Untuk mengetahui bagaimanakah penyelenggaraan pendidikan inklusi di sekolah dan apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan standar yang diperuntukkan bagi kegiatan tersebut, maka dalam hal ini fokus penelitian dititikberatkan pada evaluasi penyelenggaraan pendidikan inklusi bagi peserta didik berkebutuhan khusus di SD Negeri 131/IV Kota Jambi. Kegiatan evaluasi dilakukan menggunakan model evaluasi CIPP, di mana peneliti meninjau permasalahan dari aspek konteks, input, proses, dan produknya.

Informasi yang diperoleh akan sangat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternatif dan strategi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah tersebut. Penelitian evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusi ini juga penting dilakukan dalam rangka penyesuaian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi, dan kebutuhan masyarakat yang senantiasa berubah.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi yang menggunakan metode kualitatif, dibangun berlandaskan paradigma naturalistik (post-positivistik). Penelitian dilakukan dengan mengamati implementasi pendidikan inklusi di SD Negeri 131/IV Kota Jambi secara alamiah, di mana dalam penelitian ini peneliti berusaha memahami subjek melalui kerangka berpikir sendiri, seperti halnya kaidah penelitian kualitatif yang disampaikan oleh Denzin dan Lincoln yang dikutip oleh Creswell (2007:36).

Penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan Juli 2013 yang terbagi menjadi tiga tahap penelitian. Tahap pertama yaitu kegiatan pra penelitian pada bulan Oktober sampai November 2012, tahap kedua pada bulan Februari sampai Juni 2013 yaitu kegiatan penelitian setelah usulan penelitian diseminarkan, dan tahap ketiga pada bulan Juli 2013 yaitu kegiatan analisis dan verifikasi data sekaligus melengkapi data-data yang tertinggal.

Sumber data dalam penelitian ini dipilih dalam konteks penelitian sesuai dengan fokus dan kebutuhan analisis data. Penentuan sumber data bergantung pada unsur-unsur sebelumnya dan dipilih secara *purposive*. Data dalam penelitian kualitatif ini terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi, serta data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumentasi. Peneliti menggunakan *in-depth interview*, yaitu wawancara mendalam yang tidak terstruktur ketat. Observasi dilakukan secara terus terang dan tersamar. Selain itu peneliti juga melakukan pengumpulan data melalui studi dokumentasi yaitu dokumen mengenai profil sekolah, data peserta didik, foto-foto, dan sebagainya. Pengembangan pedoman wawancara, observasi, dan dokumentasi disesuaikan dengan kisi-kisi indikator temuan yang telah dibangun.

Tabel 1. Kisi-Kisi Indikator Temuan Penelitian

No	Indikator	Sub Indikator
1.	Konteks	Kedaaan geografis SDN 131/IV Kota Jambi, permintaan, dukungan, dan aspirasi masyarakat, kebijakan pemerintah dan sekolah, permasalahan dan peluang.
2.	Input	Visi, misi, dan tujuan sekolah, guru, GPK, <i>shadow</i> , fasilitas, peserta didik, dan sikap kemandirian.
3.	Proses	Implikasi kurikulum, perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi belajar.
4.	Produk	Prestasi akademik dan non akademik lulusan dan peserta didik yang masih berada di sekolah, dampak bagi warga sekolah dan masyarakat.

Dalam penelitian ini, yang menjadi instrumen utama dalam kegiatan pengumpulan data adalah peneliti sendiri. Dalam penelitian ini, peneliti merupakan alat pengumpul data yang sekaligus menganalisis data dan melaporkan hasil penelitian. Dalam penelitian kualitatif analisis data secara umum dipilah atas tiga tingkat, yaitu: analisis pada tingkat awal, analisis pada saat pengumpulan data di lapangan, dan analisis setelah selesai pengumpulan data (Huberman dan Miles, dalam Sukirno, 1997:77). Analisis pada tingkat awal berfungsi untuk mengarahkan dan memfokuskan ruang lingkup penelitian sehingga memantapkan kerangka konseptual desain penelitian. Selanjutnya tingkat analisis pada saat pengumpulan data di lapangan. Pengumpulan data di lapangan dimulai dengan proses penelusuran data melalui teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Data atau informasi yang diperoleh diidentifikasi satuan analisisnya dan dibuat kategorisasinya. Alternatif kategori yang telah dibuat itu diuji keabsahannya melalui triangulasi, membercek, dan perpanjangan pengamatan. Apabila data yang diperoleh sudah dianggap jenuh, selanjutnya data didokumentasikan ke dalam kartu kode satuan analisis. Tetapi apabila data belum jenuh, maka peneliti dapat kembali pada kegiatan pengumpulan data atau kembali pada kegiatan reduksi data sampai ditemukan titik jenuh pada data. Setelah pengumpulan data dianggap selesai, maka tahap selanjutnya adalah tingkat analisis setelah selesai pengumpulan data yang bertujuan untuk menarik kesimpulan dan verifikasi.

Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi yang berusaha membandingkan penyelenggaraan pendidikan inklusi di lapangan dengan kriteria tertentu atau standar yang seharusnya. Kriteria yang disusun berupa kriteria kualitatif. Hal-hal yang dipertimbangkan dalam menentukan kriteria kualitatif adalah indikator dalam komponen objek yang diteliti, yaitu indikator pembentuk dari implementasi pendidikan inklusi (Arikunto dan Jabar, 2010:36). Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Kriteria Pengambilan Keputusan

Nilai	Kriteria	Keterangan
5	Jika memenuhi 80% - 100% indikator	Sangat Baik
4	Jika memenuhi 66% - 79% indikator	Baik
3	Jika memenuhi 56% - 65% indikator	Cukup
2	Jika memenuhi 40% - 55% indikator	Kurang Baik
1	Jika memenuhi kurang dari 40% indikator	Tidak Baik

TEMUAN

Penyelenggaraan pendidikan inklusi bagi peserta didik berkebutuhan khusus di SD Negeri 131/IV Kota Jambi ditinjau dari aspek konteks tergolong dalam kriteria cukup baik, di mana terdapat 56,76% sub indikator yang telah memenuhi standar dan

43,24% sub indikator yang belum memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang seharusnya. Sub indikator yang telah sesuai dengan standar antara lain terdapat banyak orangtua yang mendaftarkan anaknya yang memiliki kebutuhan khusus di sekolah tersebut, terdapat dukungan dan aspirasi dari masyarakat, sudah ada anggaran khusus dari pemerintah yang disediakan untuk membantu sekolah-sekolah inklusi dalam APBN dan APBD, telah menggunakan kurikulum fleksibel, dan sekolah telah terakreditasi A. Sementara itu sub indikator yang belum atau tidak sesuai dengan standar antara lain adalah kurangnya lahan sekolah untuk menyediakan ruang khusus yang diperlukan, tidak ada bantuan tenaga pembimbing khusus oleh pemerintah, kurangnya kegiatan sosialisasi dan koordinasi kebijakan, kurangnya pembinaan dan pengawasan, belum pernah diadakan evaluasi terhadap pelaksanaan inklusi, ditemukan adanya peserta didik berkebutuhan khusus yang mengalami kemunduran dalam perkembangan psikologisnya, dan kurangnya pengetahuan serta kemampuan sumberdaya manusia yang terlibat dalam penyelenggaraan inklusi di sekolah tersebut.

Penyelenggaraan pendidikan inklusi bagi peserta didik berkebutuhan khusus di SD Negeri 131/IV Kota Jambi ditinjau dari aspek input tergolong dalam kriteria sangat baik, di mana terdapat 80,95% sub indikator yang telah memenuhi standar dan 19,05% sub indikator yang belum memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang seharusnya. Sub indikator yang telah sesuai dengan standar antara lain memiliki visi dan misi yang jelas mengenai penyelenggaraan inklusi, melaksanakan kegiatan sosialisasi visi dan misi sekolah, mengirim beberapa orang guru untuk mengikuti pelatihan mengenai pendidikan inklusi, serta mengadakan sharing dan konsultasi dengan pihak-pihak lain yang berkompeten, fasilitas yang ada telah memenuhi persyaratan Standar Nasional Pendidikan, menyiapkan media pembelajaran, peserta didik harus melampirkan hasil pemeriksaan dokter/psikolog, menerima peserta didik dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki, melaksanakan asesmen awal, mandiri dalam mengambil keputusan, melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan inklusi. Adapun sub indikator yang belum sesuai dengan standar antara lain adalah pengadaan GPK harus disediakan sendiri oleh orang tua, masih ada guru yang belum menjalankan tugas dan fungsinya sebagai guru inklusi, sekolah belum membuat persyaratan khusus mengenai shadow, sekolah belum memiliki ruang sumber atau ruang khusus, dan pendistribusian bantuan pemerintah berupa peralatan dan media pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus belum sepenuhnya tepat sasaran.

Penyelenggaraan pendidikan inklusi bagi peserta didik berkebutuhan khusus di SD Negeri 131/IV Kota Jambi ditinjau dari aspek proses tergolong dalam kriteria baik, di mana terdapat 71,43% sub indikator yang telah memenuhi standar dan 28,57% sub indikator yang belum sesuai dengan standar yang seharusnya. Sub indikator yang telah sesuai dengan standar antara lain: (a) dalam perencanaan pembelajaran telah menggunakan kurikulum yang fleksibel, telah dirancang silabus dan RPP untuk peserta didik berkebutuhan khusus, dan telah di rancang PPI bagi peserta didik yang membutuhkan; (b) dalam pelaksanaan pembelajaran telah dibuat penjadwalan

husus untuk intervensi yang akan diberikan, adanya pemberian motivasi yang sesuai, dan adanya pembuatan catatan kemajuan belajar; (c) sementara itu dalam pelaksanaan evaluasi pembelajaran semua sub indikator telah memenuhi standar di mana kegiatan evaluasi belajar telah dilakukan secara berkesinambungan, pelaksanaannya sesuai dengan prinsip penilaian, terdapat penyesuaian waktu, penyesuaian cara, penyesuaian isi, menggunakan alat penilaian yang bervariasi, cakupan evaluasi meliputi aspek kognitif, afektif, psikomotorik, mengadakan tindak lanjut dengan mengadakan perbaikan program atau proses pembelajaran. Adapun sub indikator yang belum sesuai dengan standar antara lain adalah: (a) dalam perencanaan pembelajaran, perancangan RPP dan PPI oleh guru umum dan GPK kurang memperhatikan struktur isi bidang studi secara keseluruhan, lebih mengikuti urutan topik dalam buku teks tertentu; dan (b) dalam pelaksanaan pembelajaran, pendekatan yang digunakan oleh guru kurang bervariasi, penggunaan media pembelajaran juga kurang bervariasi di mana guru dan GPK lebih banyak menggunakan LKS, bagi peserta didik yang memiliki hambatan dalam penggunaan LKS memiliki interaksi yang kurang baik terhadap LKS sebagai media pembelajaran, dan penggunaan LKS tidak menimbulkan motivasi tertentu kepada peserta didik berkebutuhan khusus karena mereka mengerjakan latihan dan tugas-tugas dalam LKS sekedar untuk menuruti perintah GPK/shadow.

Penyelenggaraan pendidikan inklusi bagi peserta didik berkebutuhan khusus di SD Negeri 131/IV Kota Jambi ditinjau dari aspek produk tergolong dalam kriteria cukup baik, di mana terdapat 64,28% sub indikator yang telah memenuhi standar dan 35,72% sub indikator yang belum sesuai dengan standar yang seharusnya. Sub indikator yang telah sesuai dengan standar antara lain: adanya perubahan dari sistem mainstreaming di mana peserta didik dipaksakan untuk mengikuti kurikulum reguler menjadi sistem inklusi dengan menggunakan kurikulum yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, semua lulusan mengalami kemajuan yang signifikan baik di bidang sosial emosi, olah raga, maupun seni, lulusan ada yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu ke SLB, SMP Negeri inklusi, dan SMP Swasta inklusi, dan pada umumnya warga sekolah menerima dengan baik keberadaan peserta didik berkebutuhan khusus yang berada di sekolah tersebut. Adapun sub indikator yang belum sesuai dengan standar antara lain adalah: ada juga lulusan yang tidak melanjutkan pendidikannya, keberadaan dan prestasi lulusan belum banyak diketahui masyarakat luas dan pada umumnya mereka kurang dilibatkan dalam kegiatan bermasyarakat secara umum, dan masih ada anggapan dari masyarakat bahwa kelainan pada anak berkebutuhan khusus merupakan penyakit menular yang berbahaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

SD Negeri 131/IV Kota Jambi terletak di Jalan Kapten A. Khatib Rt. 14, tidak jauh dari SLB, di mana akses jalan menuju ke sekolah juga merupakan akses menuju SLB. SD Negeri 131/IV Kota Jambi dan SLB berjarak kurang lebih 1 km, dapat ditempuh dengan berjalan kaki dengan waktu yang tidak lama, yaitu sekitar 10 sampai 15 menit. Penyelenggaraan inklusi di Indonesia dilatar belakangi oleh keberadaan SLB yang pada umumnya hanya terletak di ibu kota propinsi/ kabupaten, sementara anak berkebutuhan khusus tersebar hampir di seluruh daerah. Akibatnya, sebagian dari anak-anak berkebutuhan khusus terpaksa tidak bersekolah karena lokasi SLB jauh dari rumah, sementara sekolah reguler yang terdekat tidak mau menerima karena merasa tidak mampu melayani, dan tidak memungkinkan bagi pemerintah membangun SLB di tiap kecamatan (Depdiknas, 2007a:1-3). Untuk memberikan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus agar mendapat pendidikan yang layak, maka pendidikan inklusi perlu diselenggarakan dengan ketentuan minimal 1 lembaga pendidikan dasar pada tiap kecamatan. Namun, walaupun SD Negeri 131/IV Kota Jambi secara geografis terletak berdekatan dengan SLB, hal ini tidak menyurutkan pihak sekolah untuk tetap mengimplementasikan pendidikan inklusi. SD Negeri 131/IV Kota Jambi memiliki 12 rombongan belajar. Berdasarkan standar pemerintah, seharusnya sekolah memiliki luas lahan minimal 2270 m², namun pada kenyataannya lahan sekolah hanya seluas 1.500 m² yang tentunya turut mempengaruhi kualitas pelayanan dalam pengimplementasian pendidikan inklusi. Implementasi pendidikan inklusi di SD Negeri 131/IV Kota Jambi sangat dibutuhkan masyarakat sekitar karena adanya keinginan dan kebutuhan untuk menyekolahkan anak-anaknya yang memiliki kebutuhan khusus di sekolah reguler. Sebagai sebuah inovasi baru di dunia pendidikan Indonesia, pro dan kontra terhadap implementasi pendidikan inklusi masih terjadi. Walaupun pro dan kontra masih terjadi, namun dukungan dari masyarakat dan pemerintah terhadap penyelenggaraan inklusi di SD Negeri 131/IV Kota Jambi tetap ada, baik dukungan berupa moril maupun materiil. Selain sumbangsih berupa kritik dan saran, dukungan dari masyarakat juga berbentuk keterlibatan beberapa warga yang berperan sebagai GPK atau shadow, sedangkan dukungan dari pemerintah berupa anggaran dana yang disediakan khusus untuk membantu sekolah-sekolah inklusi yang tertuang dalam APBN dan APBD. Seperti yang disebutkan dalam pedoman penyelenggaraan pendidikan inklusi mengenai pemberdayaan masyarakat (Depdiknas, 2007i:11), berbagai bentuk dukungan diperlukan dalam rangka menciptakan atmosfir pendidikan inklusi di mana dalam penyelenggaraan inklusi diperlukan kerjasama yang baik dan berkesinambungan antara sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Dukungan tidak hanya dalam bentuk pendanaan, tetapi juga berupa sumbangan pemikiran dan ketenagaan.

Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pendidikan inklusi, pihak sekolah mengirim beberapa orang guru untuk mengikuti kegiatan pelatihan mengenai pendidikan inklusi dengan harapan para guru memiliki kesiapan dan pemahaman yang lebih baik untuk melayani peserta didik berkebutuhan khusus di kelas. Seperti yang disampaikan oleh Kustawan (2012:76), peningkatan kompetensi begitu penting bagi para pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah penyelenggara

pendidikan inklusi agar mereka dapat memahami konsep dan regulasi pendidikan inklusi, memahami keberagaman karakteristik peserta didik, menyusun rencana pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan menilai hasil belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus.

Salah satu syarat sekolah penyelenggara inklusi adalah memiliki Guru Pendidikan Khusus/Guru Pembimbing Khusus (GPK). Menurut Kustawan (2012:49), satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi sebaiknya mempunyai guru yang memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidikan khusus. GPK adalah guru yang memiliki kualifikasi akademik minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S-1) latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan khusus atau pendidikan luar biasa.

Dalam pedoman khusus penyelenggaraan pendidikan inklusi mengenai pengadaan dan pembinaan tenaga pendidik (Depdiknas, 2007g:5-8), disebutkan bahwa terdapat tiga alternatif status kepegawaian bagi GPK. Pertama, GPK bisa berasal dari guru tetap SLB yang ditugaskan oleh Dinas Pendidikan Propinsi untuk melayani beberapa sekolah umum yang menyelenggarakan pendidikan inklusi. Kedua, GPK bisa berupa guru tetap pada sekolah umum yang memiliki latar belakang pendidikan luar biasa atau latar belakang pendidikan umum namun telah mengikuti sertifikasi tentang pendidikan luar biasa. Ketiga, GPK adalah guru-guru yang ada di "klinik-klinik pendidikan" atau pusat pengembangan anak.

Selain GPK, dalam mengimplementasikan strategi pembelajaran inklusi juga dibutuhkan peran seorang shadow. Di dalam pedoman penyelenggaraan pendidikan inklusi tidak terdapat penjelasan khusus mengenai persyaratan seorang shadow, namun dijelaskan bahwa shadow direkrut dan diperkerjakan oleh orang tua peserta didik dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh sekolah (Depdiknas, 2007j:27), sedangkan sekolah tempat penelitian berlangsung belum memiliki persyaratan khusus bagi shadow. Menurut Kustawan (2012:79-80), seorang shadow harus mempunyai dedikasi tinggi, tidak gampang menyerah, empati, dan disegani oleh peserta didik yang didampingi.

Implementasi pendidikan inklusi juga membutuhkan penyesuaian sarana dan prasarana untuk menunjang kebutuhan pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus. Secara umum sarana dan prasarana di SD Negeri 131/IV Kota Jambi telah memenuhi standar nasional pendidikan sarana dan prasarana sekolah dasar. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan di sekolah penyelenggara pendidikan inklusi tidak berbeda dengan sarana dan prasarana yang dibutuhkan di sekolah reguler pada umumnya, hanya memerlukan sedikit modifikasi dalam penggunaannya, disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik di sekolah tersebut (Depdiknas, 2007h:4).

Temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam pengorganisasian isi pembelajaran, penyusunan silabus dan RPP di SD Negeri 131/IV Kota Jambi dilakukan oleh guru umum, sedangkan PPI dan RPP bagi peserta didik berkebutuhan khusus dirancang oleh GPK dengan bimbingan Kepala SLB dan psikolog dari lembaga terapi. Secara tidak langsung penyusunan PPI dan RPP bagi peserta didik berkebutuhan khusus

juga melibatkan guru kelas dan guru mata pelajaran karena materi yang disusun tetap berpatokan pada silabus dan RPP dari guru kelas dan guru mata pelajaran.

Dalam penyusunan silabus dan RPP selama ini ternyata guru umum maupun GPK kurang memperhatikan struktur isi bidang studi secara keseluruhan, tetapi lebih mengikuti urutan topik dalam buku teks tertentu. Menurut Muhaimin (2001:102) isi buku teks lebih banyak disusun menggunakan pendekatan disiplin ilmu yang mengutamakan kekayaan dan kelengkapan isi, bukan pendekatan metodologi pembelajaran sehingga tidak terlihat adanya kaitan antara bab yang satu dengan bab lainnya. Akibatnya, sajian materi pembelajaran menjadi kurang bermakna, dan peserta didik gagal untuk memahami isi bidang studi secara utuh (Sjarkawi, 2007:6). Adapun PPI yang disusun oleh GPK didahului dengan kegiatan asesmen, selanjutnya hasil asesmen mengenai karakteristik peserta didik menjadi pijakan dalam perancangan PPI. Pada dasarnya PPI mengacu pada kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah, namun terdapat beberapa bagian yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat perkembangan peserta didik secara individual.

Temuan selanjutnya yaitu bahwa dalam menyampaikan pembelajaran guru pada umumnya menggunakan metode ceramah dan pemberian tugas. Guru menggunakan pendekatan pembelajaran langsung dan pembelajaran individual, dimana menurut Direktorat PLB kedua pendekatan tersebut dapat digunakan di kelas inklusi (Depdiknas, 2007d:25-26).

Kegiatan pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah inklusi perlu dilakukan dengan mengkombinasikan berbagai pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Namun ternyata guru tidak menggunakan metode lain yang lebih beragam. Dengan mengkombinasikan berbagai pendekatan diharapkan dapat menjadikan aktivitas belajar menjadi lebih hidup, penuh tantangan, dan menyenangkan (Depdiknas, 2007d:25).

Menurut Direktorat PLB guru dapat menggunakan pendekatan pembelajaran kooperatif di kelas inklusi (Depdiknas, 2007d:25-26) karena dapat meningkatkan partisipasi peserta didik untuk berinteraksi dan belajar bersama-sama peserta didik lainnya yang memiliki latar belakang berbeda-beda dimana melalui penggunaan struktur penghargaan kooperatif peserta didik belajar untuk menghargai satu sama lain (Trianto, 2007:44).

Penyampaian pembelajaran juga terkait dengan penggunaan media sebagai penyalur pesan dari pendidik ke peserta didik. Ruang lingkup media pembelajaran di sekolah inklusi idealnya mencakup semua jenis media pendidikan untuk semua peserta didik termasuk di dalamnya peserta didik berkebutuhan khusus (Depdiknas, 2007m:7), dan dalam implementasinya diupayakan pendidik dapat memilih media yang sesuai dengan karakteristik bidang studi dan karakteristik peserta didik yang dihadapi.

Selanjutnya, implementasi pendidikan inklusi juga terkait dengan penjadwalan, pembuatan catatan kemajuan, dan pemberian motivasi. Pengelolaan pembelajaran dengan penjadwalan yang diimplementasikan di SD Negeri 131/IV Kota Jambi telah sesuai dengan filosofi pendidikan inklusi di mana peserta didik berkebutuhan khusus benar-benar belajar bersama-sama dengan peserta didik "normal" tanpa

adanya pemisahan. Peserta didik di dalam kelas reguler tidak dipisahkan ke dalam kelompok khusus (bentuk kelas reguler dengan cluster) dan tidak ada saat-saat di mana peserta didik harus ditarik dari kelas reguler ke ruang sumber (bentuk kelas reguler dengan pull out).

Dalam pengelolaan pembelajaran, GPK atau shadow di SD Negeri 131/IV Kota Jambi sudah membuat catatan kemajuan belajar bagi peserta didik yang didampingi, namun karena belum ada bentuk baku format pencatatan yang efektif, GPK atau shadow mencatat di buku tulis masing-masing dengan format yang beragam.

Selanjutnya, proses pembelajaran akan berhasil jika peserta didik memiliki motivasi dalam belajar. Untuk memperoleh hasil belajar optimal, guru, GPK, dan shadow dituntut kreatif membangkitkan motivasi belajar peserta didik. Karena setiap peserta didik membawa seperangkat sikap yang berbeda-beda, maka upaya guru, GPK, atau shadow untuk memotivasi peserta didik juga berbeda-beda. Guru, GPK, atau shadow selalu memberikan komentar positif terhadap perilaku baik yang ditunjukkan peserta didik, kontak mata dan sentuhan selalu diberikan untuk menjaga perhatian peserta didik agar selalu terpusat pada kegiatan pembelajaran, serta teguran secara verbal ataupun non verbal diberikan jika peserta didik kehilangan konsentrasi belajarnya. Upaya yang telah dilakukan untuk memotivasi peserta didik berkebutuhan khusus di SD Negeri 131/IV Kota Jambi telah sesuai dengan cara-cara yang disebutkan oleh Sanjaya (2008:29-31).

Selanjutnya adalah evaluasi. Kustawan (2012:71-73) menyebutkan bahwa dalam kegiatan evaluasi belajar di kelas inklusi diperlukan adanya beberapa penyesuaian. Penyesuaian dalam sistem penilaian di kelas inklusi meliputi penyesuaian waktu, penyesuaian cara, dan penyesuaian isi. GPK/shadow menggunakan beragam cara yang memungkinkan bagi peserta didik berkebutuhan khusus agar mereka dapat menunjukkan unjuk kerjanya secara maksimal.

Kegiatan evaluasi belajar yang dilakukan oleh GPK/shadow tidak semata-mata untuk mengetahui kemajuan atau keberhasilan peserta didik dalam pencapaian tujuan pembelajaran, tetapi hasil penilaian juga digunakan GPK/shadow sebagai bahan pertimbangan dalam perbaikan program (PPI) dan menentukan kegiatan tindak lanjut yang diperlukan seperti kegiatan remedial.

Implementasi strategi pembelajaran inklusi bertujuan membantu peserta didik berkebutuhan khusus agar mampu melakukan kegiatan sehari-hari tanpa bantuan orang lain melalui kemampuan dirinya, mempunyai kematangan diri dan kematangan sosial, bertanggung jawab secara pribadi dan sosial, serta mempunyai kematangan untuk melakukan penyesuaian diri dan penyesuaian terhadap lingkungan (Delphie, 2005:169-170). Menurut Mudjito dkk. (2012:65-78), setelah mengikuti proses implementasi strategi pembelajaran inklusi di sekolah diharapkan peserta didik berkebutuhan khusus memiliki kemampuan yang meliputi ranah kognitif, psikomotorik, soft skills, dan karakter.

Pada temuan penelitian dijelaskan bahwa lulusan pertama peserta didik berkebutuhan khusus tidak menunjukkan adanya perkembangan akademik yang signifikan karena pelaksanaan pendidikan inklusi pada masa itu menggunakan model mainstreaming di mana peserta didik dipaksakan mengikuti kurikulum

reguler walaupun pada kenyataannya ia tidak mampu menjalaninya. Akibatnya, selama proses pembelajaran tidak ditemukan adanya perubahan yang signifikan pada kemampuannya, khususnya pada kemampuan akademik.

Pada ranah kognitif, yang menjadi tujuan pendidikan pada hakikatnya adalah untuk meningkatkan daya nalar peserta didik sehingga suatu saat peserta didik memiliki kemampuan mengambil keputusan yang sistematis dalam meng-hadapi persoalan yang ditemui (Mudjito dkk., 2012:66). Menurut Ainscow (2001:111), pendidikan inklusi tidak mempermasalahkan apakah anak berkebutuhan khusus dapat mengikuti program pendidikan, namun bagaimana guru dan sekolah dapat mengadaptasi program pendidikan agar sesuai dan layak bagi kebutuhan individu. Seharusnya, pendidik tidak perlu memaksakan pembelajaran yang berada di luar batas kemampuan peserta didik. Dalam hal ini, seharusnya pembelajaran lebih di arahkan untuk mengembangkan daya nalar peserta didik terkait permasalahan yang mungkin ditemui dalam kehidupannya sehari-hari.

Dalam ranah soft skill yang terdiri dari kemampuan intrapersonality dan interpersonal, semua lulusan mengalami kemajuan perkembangan yang cukup baik. Lulusan memiliki pemahaman cukup baik mengenai kebutuhan dirinya sendiri, perawatan diri, dan memiliki pemahaman mengenai manajemen waktu dan lingkungan. Kemampuan peserta didik untuk berkomunikasi juga mengalami kemajuan yaitu dapat bersosialisasi di lingkungan yang lebih luas.

Pada unsur sikap dan perilaku juga tampak adanya kemajuan. Lulusan memiliki pengetahuan yang lebih baik mengenai standar boleh dan tidak boleh dalam berperilaku dan bersikap, terbiasa mandiri, tidak merasa rendah diri, dan tampil dengan percaya diri. Pembentukan sikap dan perilaku penting bagi peserta didik berkebutuhan khusus, baik bersikap dan berperilaku terhadap diri sendiri, teman, lingkungan, maupun kepada sang Pencipta.

Pendidikan inklusi juga bertujuan untuk membangun keterampilan dan bakat alamiah yang dimiliki peserta didik. Orang tua, guru, dan terapis perlu berupaya mengidentifikasi bakat alamiah yang dimiliki peserta didik agar dapat dikelola dan dikembangkan dengan baik. Lulusan pertama berprestasi di bidang olah raga, sedangkan lulusan kedua memiliki kemampuan luar biasa dalam menghafal berbagai jenis lagu dan sering mendapatkan undangan untuk mengisi acara pada peringatan Hari Anak Nasional dan Hari Autis Sedunia.

Keberhasilan komponen produk pendidikan tidak hanya dapat ditinjau dari segi hasil, tetapi juga dapat ditinjau dari segi dampak. Terdapat beberapa peserta didik berkebutuhan khusus yang memiliki prestasi luar biasa, namun pada kenyataannya keberadaan dan prestasi peserta didik berkebutuhan khusus belum banyak diketahui masyarakat luas. Masyarakat pada umumnya kurang memberikan kesempatan kepada peserta didik berkebutuhan khusus untuk menampilkan potensinya, misalnya mengadakan perlombaan atau kegiatan-kegiatan yang juga melibatkan anak-anak berkebutuhan khusus. Namun yang lebih mengkhawatirkan, implementasi pendidikan inklusi ternyata belum sepenuhnya dapat menghapus penilaian warga masyarakat yang menganggap bahwa kelainan yang diderita anak-anak berkebutuhan khusus merupakan penyakit menular dan berbahaya.

Berbeda dengan penerimaan warga dalam kehidupan bermasyarakat, penerimaan warga di sekolah jauh lebih ramah dan lebih baik. Secara umum komunitas sekolah dapat menerima peserta didik berkebutuhan khusus dengan baik dan memperlakukannya dengan penuh kasih sayang walaupun ternyata masih ada beberapa teman yang suka menggaggu atau menggoda serta memberikan label ABK kepada peserta didik berkebutuhan khusus tersebut.

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai evaluasi pendidikan inklusi di SD Negeri 131/IV Kota Jambi, dapat disimpulkan bahwa secara umum penyelenggaraan pendidikan inklusi bagi peserta didik berkebutuhan khusus di SD Negeri 131/IV Kota Jambi tergolong dalam kriteria baik, di mana persentase sub indikator dari implementasi pendidikan inklusi di SD Negeri 131/IV Kota Jambi yang telah memenuhi standar adalah sebesar 68,35% dan 31,64% sub indikator lainnya masih belum sesuai dengan standar yang seharusnya.

IMPLIKASI

Sebagai suatu penelitian yang berada dalam kawasan teknologi pendidikan maka kesimpulan yang ditarik tentu mempunyai implikasi dalam bidang teknologi pendidikan dan juga penelitian-penelitian selanjutnya, sehubungan dengan hal tersebut maka implikasinya adalah sebagai berikut:

- 1) Implikasi teoretik: Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah tersebut dengan cara memperbaiki komponen-komponen yang belum sesuai dengan standar yang seharusnya.
- 2) Implikasi manajerial: Berdasarkan hasil evaluasi ditemukan bahwa fasilitas yang tersedia pada umumnya sudah memenuhi kebutuhan pelaksanaan inklusi di sekolah. Sementara itu beberapa fasilitas yang tidak tersedia telah terpenuhi melalui kerja sama dengan sebuah lembaga terapi sebagai mitra kerja. Namun terkait dengan sumberdaya manusia yang terlibat di dalamnya, ditemukan bahwa sekolah belum menyediakan GPK, dan juga ditemukan kurangnya sosialisasi serta peningkatan kompetensi pendidikan khusus bagi guru kelas. Sekolah perlu bekerjasama dengan pemerintah untuk menyediakan GPK agar hal ini tidak menjadi beban bagi orang tua peserta didik. Selanjutnya, pihak sekolah perlu menyelenggarakan pelatihan secara internal bagi guru di sekolah tersebut sehingga guru memiliki pengetahuan yang memadai untuk memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang mengenyam pendidikan di sekolah tersebut.
- 3) Implikasi metodologi: Untuk memperoleh temuan-temuan yang lebih spesifik pada setting penelitian maka diperlukan penelitian serupa dengan mempersempit fokus penelitian, yaitu meneliti salah satu komponen yang ingin diketahui secara lebih mendalam. Selain itu, untuk menyempurnakan penelitian

ini maka pihak lain dapat menambahkan metode kuantitatif untuk memperkuat temuan dan hasil penelitian.

SARAN

Mengacu pada sajian dari simpulan, implementasi pendidikan inklusi bagi peserta didik berkebutuhan khusus pada sekolah inklusi di SD Negeri 131/IV Kota Jambi secara umum sudah berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang bermanfaat, namun ada beberapa bagian dari komponen pendukung program yang kurang sesuai dengan standar, oleh karena itu peneliti merekomendasikan agar program dapat dilanjutkan dengan syarat harus dilakukan revisi melalui penyesuaian dan perbaikan pada beberapa bagian agar kualitas program menjadi lebih baik lagi sebagaimana uraian berikut ini:

- 1) Sampai saat ini pihak sekolah belum mampu menyediakan GPK, oleh karena itu diperlukan adanya terobosan-terobosan baru untuk bekerjasama dengan pemerintah dalam hal pengadaan GPK.
- 2) Sebaiknya perlu diadakan sosialisasi ulang di sekolah untuk mengingatkan kembali para guru mengenai tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya untuk ikut berpartisipasi mensukseskan implementasi pendidikan inklusi.
- 3) Sekolah perlu membuat persyaratan khusus mengenai *shadow* dengan memperjelas kualifikasi, tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya.
- 4) Sebaiknya sekolah menyediakan ruang sumber sebagai tempat peralatan dan media pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus, atau ruang khusus yang dapat digunakan sewaktu-waktu oleh GPK untuk memberikan intervensi kepada peserta didik berkebutuhan khusus.
- 5) Dalam merancang RPP dan PPI, sebaiknya guru dan GPK lebih memperhatikan struktur isi bidang studi secara keseluruhan
- 6) Sebaiknya pemerintah mengadakan pelatihan di bidang pendidikan khusus untuk meningkatkan kompetensi para guru di sekolah inklusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainscow, Mel. 2001. Reaching Out to All Learner: Some Opportunities and Challenges, dalam Harry Daniels (eds.), *Special Education Re-Formed: Beyond Rhetoric?*, hal. 101-122, Taylor & Francis e-Library, New York.
- Creswell, John W. 2007. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. California: Sage Publications, Inc.
- Delphie, Bandi. 2005. *Program Pembelajaran Individual Berbasis Gerak Irama, Untuk Pendidikan Umum, Khusus, dan Pendidikan Inklusif Tingkat Dasar dan Menengah (TK, SD, dan SMP)*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Depdiknas. 2007a. *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif*. Jakarta: Depdiknas, Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa.
- Depdiknas. 2007b. *Pedoman Khusus Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. Identifikasi Anak Berkebutuhan Khusus*. Jakarta: Depdiknas, Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa.

- Depdiknas. 2007bc. *Pedoman Khusus Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. Pengembangan Kurikulum*. Jakarta: Depdiknas, Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa.
- Depdiknas. 2007d. *Pedoman Khusus Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. Kegiatan Pembelajaran*. Jakarta: Depdiknas, Direktorat Pembinaan SLB.
- Depdiknas. 2007e. *Pedoman Khusus Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. Penilaian*. Jakarta: Depdiknas, Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa.
- Depdiknas. 2007f. *Pedoman Khusus Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. Manajemen Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif*. Jakarta: Depdiknas, Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa.
- Depdiknas. 2007g. *Pedoman Khusus Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. Pengadaan dan Pembinaan Tenaga Pendidik*. Jakarta: Depdiknas, Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa.
- Depdiknas. 2007h. *Pedoman Khusus Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. Kebutuhan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan*. Jakarta: Depdiknas, Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa.
- Depdiknas. 2007i. *Pedoman Khusus Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Depdiknas, Direktorat Pembinaan SLB.
- Depdiknas. 2007j. *Suplemen Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. Model Program Pembelajaran Individual (PPI)*. Jakarta: Depdiknas, Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa.
- Depdiknas. 2007k. *Suplemen Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. Model Modifikasi Bahan Ajar Pendidikan Inklusif*. Jakarta: Depdiknas, Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa.
- Kustawan, Dedy. 2012. *Pendidikan Inklusif dan Upaya Implementasinya*. Jakarta: PT. Luxima Metromedia.
- Mudjito, Harizal, dan Elfindri. 2012. *Pendidikan Inklusif*. Tuntunan untuk Guru, Siswa, dan Orang Tua Anak Berkebutuhan Khusus dan Layanan Khusus. Disertai Tuntunan untuk Pemda dan Yayasan Pendidikan. Jakarta: Baduose Media.
- Muhaimin. 2001. *Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- O'Hanlon, Christine. 2003. *Educational Inclusion As Action Research*. McGraw-Hill: Open University Press.
- Sjarkawi. 2007. *Pengaruh Cara Pengorganisasian Pengajaran melalui Struktur Orientasi Konseptual terhadap Perolehan Belajar Siswa*. Malang: Wineka Media.
- Smith, J. David. 2012. *Sekolah Inklusif: Konsep dan Penerapan Pembelajaran*. Terjemahan Denis, Ny. Enrica. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Trianto. 2007. *Model-model Pembelajaran Inovatif berorientasi Konstruktivistik*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Sukirno. 1997. *Implementasi Kurikulum Politeknik dalam rangka Mempersiapkan Kemampuan Lulusan yang Adaptabel terhadap Tuntutan Kerja di Lingkungan Industri*. Disertasi. Bandung: Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bandung.

